

# PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA (Studi Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kota Semarang)

Munawar Noor

[mn1020@gmail.com](mailto:mn1020@gmail.com)

## ABSTRAKSI

Dalam perkembangan paradigma pembangunan, dewasa ini pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan manusia. Puncak kesadaran manusia adalah ketika sudah sampai pada keyakinan bahwa tujuan hidupnya adalah untuk membangun harkat dan martabat sebagai kaum miskin dan tertindas. Oleh karena itu pembangunan manusia dipandang sebagai cara yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah adalah keterbatasan anggaran untuk memenuhi hak-hak dasar warga Negara, sehingga diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah serta membangun kemitraan dan kerjasama kelembagaan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.

**Kata Kunci** : paradigma pembangunan, kemiskinan, kemauan politik, kemitraan.

## ABSTRACT

In the development paradigm of development, today's development is more geared towards human development. The highlight is the human consciousness when it came to the conviction that his goal is to build the dignity of the poor and oppressed. Therefore, human development is seen as an effective way to tackle the problem of poverty. Constraints and challenges faced by the government is a limited budget to meet the basic rights of citizens, so it requires a strong political will of the government as well as building partnerships and institutional cooperation (government, community, business) to support efforts to reduce poverty.

**Keywords**: paradigm of development, poverty, political will, partnership.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang terdapat di berbagai daerah Provinsi. Kabupaten/Kota di Indonesia. Oleh karena itu berbagai upaya penanggulangannya telah dilakukan Pemerintah melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pengentasan masyarakat miskin untuk mandiri baik secara ekonomi, sosial maupun aspek kehidupan yang lain, sehingga memerlukan

kebijakan yang komprehensif dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat miskin tersebut.

Pengalaman lapangan banyak memberikan gambaran bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat sering menimbulkan resistensi tidak saja pada pejabat pelaksana kebijakan tetapi juga sinergi kelembagaan program dengan pemerintah daerah serta kelompok sasaran, sehingga kebijakan tersebut tidak dapat di implementasikan dengan baik. Sementara itu keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi, termasuk dalamnya

adalah pemahaman kebijakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan penerimaan secara sadar oleh masyarakat.

Dalam konteks ini program bantuan langsung masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) menandai keseriusan pemerintah untuk mengubah logika pendekatan proyek menjadi program dengan melakukan konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/lembaga.

### 1.2. Perumusan Masalah

- (1). Bagaimana Implementasi Kelembagaan PNPM-MP Di Kota Semarang?
- (2). Aspek-aspek apa penghambat dan pendorong implementasi kelembagaan PNPM-MP Di Kota Semarang ?
- (3). Bagaimana formulasi model sinergitas kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang?

### 1.3. Tujuan Penelitian

- (1). Melakukan deskripsi, analisis dan interpretasi implementasi kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang
- (2). Melakukan deskripsi, analisis dan interpretasi aspek-aspek penghambat dan pendorong implementasi kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang
- (3). Merumuskan formulasi model sinergitas

kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang.

## 2. Kajian Teori

### 2.1. Lingkup Administrasi Publik

Dinamika lingkungan administrasi negara yang sangat tinggi menimbulkan banyak persoalan tentang relevansi keberadaan Ilmu Administrasi Negara sebagai administrasi pemerintahan, terutama lokus Ilmu Administrasi Negara yang dirasa tidak memadai lagi. Lembaga pemerintah dirasa terlalu sempit untuk menjadi lokus Ilmu Administrasi Negara, karena dalam kenyataan bahwa lembaga pemerintahan tidak lagi memonopoli peran yang selama ini secara tradisional menjadi otoritas pemerintah.

Faktor penyebab semakin menurunnya dominasi peran negara, antara lain : (1). Dinamika ekonomi, politik dan budaya yang membuat kemampuan pemerintah semakin terbatas untuk dapat memenuhi semua tuntutan masyarakat; (2) Globalisasi yang membutuhkan daya saing yang tinggi di berbagai sektor menuntut makin dikurangnya peran negara melalui debirokratisasi dan deregulasi; (3). Tuntutan demokratisasi mendorong semakin banyak munculnya organisasi kemasyarakatan yang menuntut

untuk dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya; (4). munculnya fenomena *hybrid organization* yang merupakan perpaduan antara pemerintah dan bisnis.

Dewasa ini sudah banyak pembaharuan pemikiran dan perhatian dari administrasi publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan berbagai konsep maupun implementasinya. Salah satu bentuk perhatian yang ditunjukkan administrasi publik adalah terhadap tata pemerintahan yang baik, yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **2.2. Pembangunan yang Berorientasi Kerakyatan**

Pembangunan yang berpusat pada manusia, memandang manusia sebagai warga masyarakat, menjadi fokus utama maupun sumber utama pembangunan, nampaknya dapat dipandang sebagai suatu strategi alternatif pembangunan masyarakat yang menjamin komplementaritas dengan pembangunan bidang-bidang lain, khususnya bidang ekonomi.

Landasan berpijak pendekatan pembangunan ini bukan birokrasi dan program serta proyek yang dirancang dan dikelola secara terpusat, tetapi program serta proyek yang

dirancang masyarakat itu sendiri, berdasarkan kebutuhannya, kemampuannya dan penguasaan atas sumberdaya dan nasib mereka sendiri yang merupakan suatu keberanian untuk berkomitmen di seluruh dunia dengan menempatkan secara langsung tiga tantangan pusat pembangunan: yaitu : (1). pengurangan kemiskinan, (2). perlindungan kapasitas produksi berdasarkan sumber daya lingkungan, dan (3). pemberdayaan manusia melalui peningkatan partisipasi di dalam proses pembangunan.

Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan untuk berkembang yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar.

## **2.3. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dalam skala yang luas, tidak semata-mata mampu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi membangun mekanisme untuk mencegah pemiskinan lebih lanjut. Sejalan dengan konsep ini, pemerintah sebagai agen perubahan dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan

masyarakat bertumpu pada tiga arah tujuan, yaitu : (1). Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (2). Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui penerapan langkah nyata, (3). Melindungi dan membela kepentingan masyarakat.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat lahir sebagai antithesis terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada mayoritas rakyat yang dibangun sebagai kerangka logis seperti : (1). Proses pemusatan pembangunan dan penguasaan faktor produksi, (2). Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran, (3). Kekuasaan akan membangun system pengetahuan, sistem hukum untuk mempercepat legitimasi, (4). Kooperasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik secara sistematis akan menciptakan kelompok masyarakat yang berdaya.

## 2.4. Kemiskinan Masyarakat

Klasifikasi dan jenis-jenis kemiskinan dalam masyarakat pada umumnya adalah

a. Kemiskinan absolute, yaitu keadaan yang mana pendapatan kasar bulanan tidak mencukupi untuk membeli keperluan minimum;

- b. Kemiskinan relative, yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu kebutuhan dengan tingkat pendapatan lainnya;
- c. Kemiskinan struktural yaitu kondisi di mana sekelompok orang berada di dalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan;
- d. Kemiskinan kultural yaitu budaya yang membuat orang miskin, yang dalam antropologi kemiskinan sebagai adanya budaya miskin.

Memperhatikan konsep dan pendekatan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah secara konseptual kesemuanya sudah mengedepankan partisipasi masyarakat dan mengutamakan pemberdayaan dalam setiap langkah kegiatannya.

Pemerintah mengambil langkah positif untuk mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), ditempuh dengan cara : (1). Mengembangkan kapasitas masyarakat, terutama Rumah Tangga Miskin dengan penyediaan sarana sosial dasar

dan ekonomi, serta lapangan kerja. (2). Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian kegiatan pembangunan, (3). Mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. (4). Dalam pelaksanaannya, PNPM-MP mengalokasikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui skema pembiayaan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## 2.5. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan seperti yang diinginkan. Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak negative maupun positif. Dengan

demikian dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Perkembangan studi implementasi mengalami pergeseran minat, dari fokus ke ujung depan dari proses kebijakan, yaitu keputusan politik menjadi fokus pasca keputusan, apa yang terjadi setelah kebijakan disahkan, yaitu dimulainya studi implementasi.

Mengawali studi implementasi adalah (Pressman dan Wildavsky, 1973) yang membahas tentang implementasi program pembangunan ekonomi perkotaan di Aucland USA dengan mewancarai actor pelaksana dan mengkaji dokumen kebijakan.

Hasilnya adalah suatu pendekatan yang bersifat rasional perspektif dengan model sudut pandang Top-down. Timbulnya model rasional perspektif sebagai tonggak awal studi implementasi adalah sangat wajar mengingat kebutuhan saat

itu adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak kebijakan mengalami kegagalan saat diimplementasikan dan bagaimana menghasilkan suatu formula implementasi yang tingkat keagalannya rendah.

Pendekatan perspektif untuk persoalan implementasi hanya akan bersifat terbatas pada ruang dan waktu serta permasalahan yang serupa. Sedangkan sebagaimana diketahui variasi masalah kebijakan yang luas, serta ruang dan waktu pemerintahan yang berbeda, akan membawa perbedaan pula dalam cara pemecahan masalahnya, oleh karena itu model Top-down kemudian diikuti oleh model sudut pandang Bottom-up dan model Sintesis.

Pendekatan Bottom-up (Michael Lypsky, 1980) merupakan kritik atas model Top-down yang menyangkal kontribusi peran pelaksana tingkat bawah pada proses implementasi, karena proses politik bukan hanya tidak berhenti saat kebijakan sudah diputuskan, tapi juga tetap berlangsung pada level pelaksana tingkat bawah yang banyak menentukan tingkat keberhasilan implementasi. Dengan demikian perlu mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi, tujuan dan kebutuhan para pelaksana termasuk kesulitan yang mereka hadapi.

Kemudian lahir sudut pandang Model Sintesis (Randall P. Ripley & Grace Franklin, 1982), yang memadukan kedua model sebelumnya (Top-down dan Bottom up) dengan tekanan utama yang bisa beragam, mulai pada jaringan interaksi antar aktor pelaksana sampai pada pendekatan sosiologis, dan sebagainya yang kemudian disebut sebagai teori atau model Hybrid.

Model sintesa/ hybrid ini pada hakekatnya ingin menegaskan bahwa tidak ada model perspektif yang bisa diterapkan pada setiap masalah implementasi. Tiap katagori kebijakan memiliki kekhasan tersendiri, sehingga pendekatannya pun harus disesuaikan dengan kondisi tersebut.

Model sintesa ini sangat beragam mulai dari yang hanya mengemukakan variable yang dianggap mempengaruhi implementasi, untuk mempermudah pengkatagorian berbagai pendekatan studi implementasi yang muncul belakangan.

Hasil pemikiran yang berbeda-beda sebagaimana tersebut di atas melahirkan studi implementasi tumbuh dari berbagai hasil penelitian mengenai praktek implementasi pada era yang berbeda-beda, dan dengan fokus perhatian yang berbeda-beda pula.

Oleh Gogin dkk (1990) perbedaan era dan fokus tersebut dikategorikan sebagai berikut: (1). Fokus Penelitian generasi pertama : a). Bagaimana suatu aturan diwujudkan sebagai hukum dan bagaimana suatu hukum dijadikan program, b). Menguraikan sifat kerumitan dan dinamika proses implementasi, c). Menekankan pentingnya subsistem kebijakan, d). Mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan hasil suatu program, e). Mendiagnosis beberapa penyakit yang sering mengganggu proses implementasi. (2). Fokus Penelitian generasi kedua: a). Jenis dan isi kebijakan, b). Organisasi pelaksana dan sumberdaya, c). Pelaksana kebijakan : sikap, motivasi, hubungan antar pribadi, komunikasi dan sebagainya, d). Hasil : pengakuan bahwa implementasi bisa berubah setiap saat, identifikasi faktor penentu keberhasilan, berbagai persoalan yang muncul, dan sebagainya. (3). Fokus Penelitian generasi ketiga: a). Bentuk komunikasi antar lembaga pemerintahan, b). Penyusunan desain penelitian, c). Mengkaji variabel-variabel prediktor dalam implementasi.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif

didukung metode triangulasi dalam analisisnya, lokasi penelitian Kota Semarang yang meliputi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan berdasarkan sampel bertujuan.

Sebagai informan adalah pengelola program Tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat miskin yang tergabung dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

### 4. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang, dalam banyak hal berjalan baik, namun masih terdapat kelemahan antar lain :
  - a. Peran masyarakat sebagai pihak yang dianggap hanya sebagai alat bantu dari mekanisme keproyekan, artinya secara terdogma pelaksanaan kegiatan PNPM-MP harus lebih baik, padahal kondisi masyarakat memiliki dinamika tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor internal Badan Keswadayaan Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat (BKM, KSM), untuk memaksimalkan konsep Tridaya. .
  - b. Penerima manfaat langsung dari PNPM-MP harus mampu melakukan transformasi sosial yang luar biasa dengan menjadi masyarakat pembangunan (daya lingkungan), masyarakat efektif (daya

- sosial) dan masyarakat produktif (daya ekonomi).
- c. Proses pembelajaran yang mengedepankan internalisasi prinsip dan nilai PNPM-MP dengan intervensi tahapan siklus dipandang sebagai formalitas semata untuk memenuhi kebutuhan proyek.
2. Aspek penghambat program di lapangan adalah :
    - a. Koordinasi kelembagaan kurang diikuti dengan peningkatan kapasitas dan perubahan paradigma dari masing-masing stakeholder dalam melihat PNPM-MP sebagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
    - b. Penjabaran kebijakan dan penganggaran di tingkat masyarakat belum secepat yang diharapkan, karena berbagai keterbatasan tersebut dan tidak ada sinergi kebijakan dengan kemauan masyarakat
    - c. Pengorganisasian sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai media peningkatan kapasitas proses berpikir kritis masyarakat seringkali tidak mendapatkan porsi yang

layak dalam realitas dampungan, sehingga sinergi sumber daya manusia dengan program belum optimal.

## 5. Implikasi Manajerial

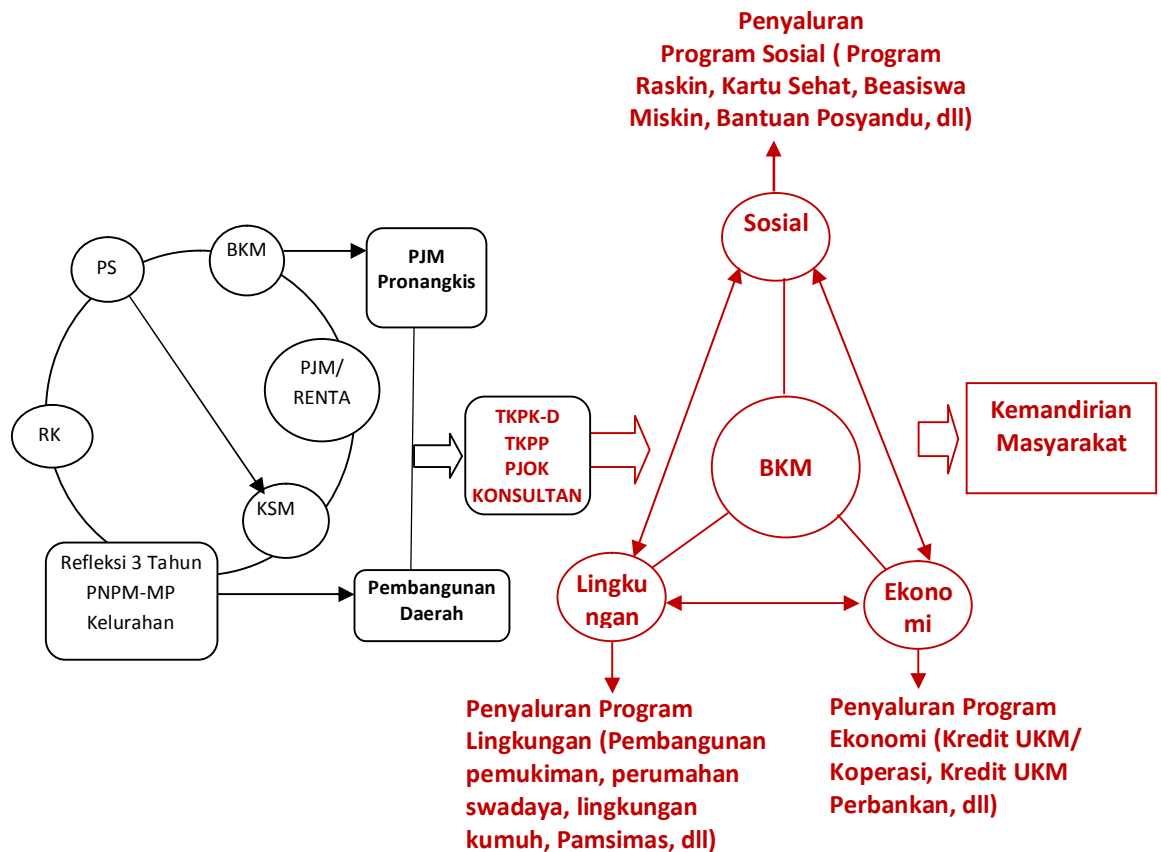
### 5.1. Formulasi Model Sinergitas Kelembagaan sebagai Rekomendasi

Hasil kajian implementasi kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang melalui : sinergi kelembagaan, siklus PNPM-MP dan aspek-aspek penghambat/pendorong implementasi kelembagaan PNPM-MP pada tataran empirical theory menunjukkan adanya kelebihan dan kelemahan.

Memanfaatkan kelebihan dan mengusulkan perbaikan kelemahan serta memperhatikan tanggapan informan pada waktu diselenggarakan FGD, maka dapat diusulkan model sinergitas kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang seperti gambar berikut :



**Formulasi Model Sinergitas Kelembagaan PNPM-MP yang direkomendasikan**



Sumber : ( Analisis Penulis).

**5.2. Usulan Model Sinergitas**

Usulan Model Sinergitas Kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang di atas berdasarkan pertimbangan :

1. Usulan Model Sinergitas Kelembagaan diharapkan mampu memberikan kesempatan Badan

Kesawadayaan Masyarakat (BKM) untuk mengakses peluang kemitraan dan channeling pada tataran kementerian dengan basis Tri-Daya (Lingkungan, Sosial, Ekonomi).

2. Dalam model sinergitas kelembagaan alternatif menunjukkan peran Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) sebagai pengendali

- kegiatan PNPM-MP tingkat kecamatan memiliki peran yang sama dengan TKPKD dalam memperkuat sinergitas kelembagaan yang akan dilakukan di tingkat kelurahan/masyarakat.
3. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam penentuan target penerima manfaat kegiatan, melakukan sinergi kelembagaan yang mengarah pada pengembangan Tri-Daya (Lingkungan, Sosial, Ekonomi), karena tanpa sinergitas kelembagaan akan menjadikan kebijakan yang bersifat parsial.
  4. Kemitraan dan channeling Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) bisa datang dari Kementrian, Perbankan, bahkan dari internal BKM sendiri, misalnya dengan KSM-KSM binaan, Lembaga Kelurahan dengan membentuk Forum Lintas Pelaku. Dengan demikian Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menjadi lembaga masyarakat yang dapat menerima segala macam program dari luar, karena substansi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah Lembaga representative warga yang dibentuk untuk merepresentasikan nilai luhur kemanusiaan serta untuk membangun kekuatan modal sosial masyarakat.
  5. Persoalan teknis yang terkait dengan operasional kegiatan program lain, dapat dibentuk oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), organ-organ tambahan dalam struktur organisasi seperti Unit Pengelola atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan sebagainya.
  6. Sinergitas kelembagaan ini merupakan sebuah dokumen yang menjadi Rencana Aksi yang lebih praktis dalam bentuk Pembangunan Jangka Menengah-Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis), yakni sebuah langkah operasional taktis dari Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD)..
  7. Peran yang lebih besar dan strategis berada di Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D) sebagai arsitek peta jalan penanggulangan kemiskinan yang terstruktur dan berkelanjutan karena secara politis relatif kuat dalam struktur Pemerintah Kota..
  8. Dalam kerangka untuk mewujudkan peran dan partisipasi masyarakat dalam good governance, proses ini melibatkan Forum BKM Kota/Kecamatan dan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) sebagai wadah relawan kota yang berkomitmen terhadap penanggulangan kemiskinan.
  9. Usulan Model Sinergitas Kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang diharapkan dapat dijadikan persiapan untuk memasuki masa phasing out program dan alih kelola program, karena sangat

diperlukan kebijakan yang strategis untuk melakukan proses tranformasi masyarakat dari tidak berdaya (miskin) → masyarakat berdaya → masyarakat mandiri → masyarakat madani dalam target waktu tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, George. 1980. *Implementing Public Policy*, Washsington DC, Congressional Quartely Press.
- Effendi.Sofyan, 1993. *Membangun Martabat Manusia, Peranan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan*. Gadjah Mada Univesity Press, Yogyakarta
- Emzir, (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, Rajawali Press, Jakarta
- Esman, Milton J. 1991. *Management Dimensions of Development : Perspective and Strategies*, Connecticut : kumarian Press
- Esmara, Hendra, 1986. *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta Gramedia
- Grindle, Merille S. (ed), 1980, *Politic and Policy Implementation in the Third Word*, New Jersey : Princeton University Press.
- Korten, David. C. 1984. *Pembangunan yang Memihak Rakyat*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Korten, D C, Sjahrir, (1988), *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Peraturan Perundangan :**
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun2010 Tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, *Tentang Kesejahteraan Sosial*, Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Tahun 2007/2008
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000, *tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)*
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, *tentang Pemerintah Daerah*
- Pedoman PNPM-Mandiri :**
- Dokumen Rencana Strategi Kemiskinan (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang-SPKD), *Bappeda Kota Semarang*, 2011-2015
- Dokumen Renstra Kemiskinan Kota Semarang, *Bappeda Kota Semarang*, 2011-2015
- Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, Tahun 2012
- Pedoman Teknis dan Pedoman Operasional Baku Rembug Warga Tahunan (RWT) PNPM-Mandiri, 2009
- Pedoman Teknis Penyusunan PJM Dan Ren-Ta Pronangkis, PNPM-Mandiri, 2009
- Journal :**
- Community Empowerment Through Group Apprach (Case Study of Poor Communities Through Kube Approach), *Joyakin Tampubolon, Basita Ginting Sugihen, Margono Slamet, Djoko Susanto da Sumardjo*. !SSN : 185-2664, Juni 2006,

- Jurnal Vol. 2 No. 2 Institut  
Pertanian Bogor;
- Decentralization and Community  
Empowerment : Does  
Community Empowerment  
Deepen Democracy and  
Improve Service Delivery?  
*Derick W Brinkerhoff with  
Omar Azfar*. Oktober 2006,  
Paper Prepared for : US Agency  
for International Development  
Office of Democracy and  
Governance, Contract No.DFD  
I-00-05-00128-00 Task Order  
No. 2
- Community Empowerment Strategies :  
The Limits and Potential of  
Community Organizing in  
Urban Neighborhoods, *Peter  
Dreier*, Ocerdental College,  
diunduh Januari 2012
- Empowerment as an Approach for  
Community Development in  
Malaysia, *Asnarulkhadi Abu  
Samah & Faribarz Aref*,  
Depatemen of Social and  
Development Science, Fakultas  
of Human Ecology Putra  
University, Malaysia, Word  
Rure Observations, 2009 : 1(2)  
:63-68
- Dikotomi Kualitatif-Kuantitatif dan  
Varian Paradigmatik dalam  
Penelitian Kualitatif, *Dedy N  
Hidayat*, jurusan Komunikasi,  
Fisip Universitas Indonesia,  
Depok, Jurnal Ilmiah Sceiptura  
Vol. 2 No. 2 Juli 2008